

RENCANA KERJA (RENJA)



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN 2024



(0451) 421755



[dpmd.sulteng](https://www.instagram.com/dpmd.sulteng)



dpmd.sultengprov.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 410.1/25.a/Dis.PMD

TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2024, maka perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2004 sekaligus sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 410/04/Dis.PMD/2022 Tanggal 10 Januari 2022;
 - b. bahwa Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 memuat program/kegiatan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
9. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 410/04/Dis.PMD/2022 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWEI TENGAH TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWEI TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud diatas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

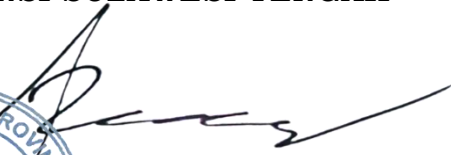
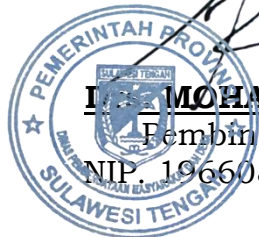
KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mencakup Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024.

KETIGA : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal: 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



MOHAMAD NADIR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660816 198603 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU..	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD.....	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	61
3.3 Program dan Kegiatan	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	88
BAB V PENUTUP.....	
5.1 Kaidah Pelaksanaan	106
5.2 Penutup.....	108

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat ridhoNya kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah, RKP 2024 dan RKPD 2024 yang berisi rincian mengenai program, sasaran, dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun tahun sebelumnya.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, atas dukungan dan partisipasinya sehingga penyusunan Rencana Kerja ini dapat terwujud. Semoga Rencana Kerja ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan panduan kerja bagi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Palu, 21 Juni 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19660816 198603 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang maju, mandiri dan sejahtera, selanjutnya diatur kembali dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Untuk itu, dalam menjalankan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Fungsi meliputi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga

- kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
 - e. Penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional tertentu, dan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yaitu **Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju** maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang disusun sebagai bentuk pelaksanaan teknis untuk pencapaian visi dan Misi Pembangunan di Sulawesi Tengah.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2022-2026 serta RKPD. Didasari hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6777);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 410/04/Dins.PMD/2022 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 151) tgl penetapan 29 Desember 2023;
22. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 901) tgl penetapan 29 Desember 2023

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk merumuskan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Rencana Strategis dan RKPD, sehingga lebih memantapkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Renja menjadi acuan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsi yang sinergi dengan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Renja sebagai dokumen yang merumuskan Program-program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2024, mengacu pada Renstra DPMD 2021-2026 dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 .

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan kaidah Penyusunan Renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, maka Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyeleenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program, dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Perkiraan Maju

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kaidah Pelaksanaan
- 5.2 Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Evaluasi sebagai sebagai salah satu metode yang berfungsi untuk peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui apakah kinerja utama dari Perangkat Daerah telah tercapai, termasuk didalamnya meliputi program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dan 2023, berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, yakni untuk mengetahui:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi/ memenuhi/ melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

- Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan 2023

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dan 2023 terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*

Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi % (t-n)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2024	2021	2022	2022	2022	2023	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71	60	62	60	60	64	70,30	199,3	281%
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	11 Dokumen	73	71	71	75	75	146	183%
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	5 dokumen	7 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	16 dokumen	400%
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	9 Laporan	300%
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan, 2 Dokumen	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	8 laporan	160%
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	100%	89,00	97,00	96,00	99%	97,00	89,17	274	27417%
		Persentase Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Kegiatan yang tepat waktu	100%								
		Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100%								
		TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	60%								

2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	64 orang	70 orang/bulan	72 orang/bulan	72 orang/bulan	100%	72 orang/bulan	64 orang/ 4 bulan (256 org)	206 orang	322%
2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	12 Kegiatan	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	600%
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	13 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	9 Laporan	300%
		Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK dan APIP	4 Laporan Hasil Penyelesaian TLHP								
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Inventarisasi BMD dan laporan Barang Persediaan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	100%
		Jumlah aset yang tercatat	1 Laporan								
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	60	1 Laporan	78,00	80.77	80.77	78,00	80,00	160,77	201%
2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	3 paket	300%
2.13.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	7 Laporan	350%
2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1	2 Laporan	200%
2.13.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang, 5 kali	12 orang, 3 kali	12 orang, 3 kali	12 orang	100%	160	160	184	194%
2.13.01.1.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	6 orang, 2 kali	6 orang, 2 kali	12 orang	100%	380	380	408	107%

2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan kebutuhan barang dan jasa penunjang pelayanan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen	800%
2.13.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	3 paket	300%
2.13.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	1 paket	50%	2 paket	2 paket	5 paket	167%
2.13.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	3 paket	300%
2.13.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	12 paket	300%
2.13.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	3 paket	150%
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4 kali	1 Laporan	1 Laporan	200%	3 Laporan	4 Laporan	9 Laporan	90%
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	60	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
2.13.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	4 Unit	-	-	0%	2 unit	2 unit	6 unit	300%
2.13.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	40 Set	-	-	0,00%	32 set	32 set	72 set	3600%
2.13.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	86 unit, 2 paket	6 paket	200%
		Jumlah Laporan Fasilitas Pengadaan barang dan Jasa Perangkat daerah	1 Laporan								
2.13.01.1.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	-	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	100%

2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	300%
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	25%	4 Laporan	4 Laporan	9 Laporan	225%
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	11 Laporan	36 Laporan	300%
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	600%
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 unit	13 unit	18 unit	18 unit	100%	31 unit	92 unit	123 unit	232%
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	2 unit	2 unit	34 unit	100%	44 Unit	44 Unit	80 unit	400%
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	2 unit	1unit	-	200%	1 Unit	2Unit	3 unit	300%
2.13.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	0	2 paket	2 paket	-	100%	-	-	2 paket	100%
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang tertata Kelembagaan Pemerintahan Desanya	82%	7,546	3.257	2,389	0%	3.257	6,080	16,015	491,710%
		Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat layanan kemasyarakatan	8,46%								
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Persentase desa yang terfasilitasi dalam penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa sesuai regulasi	8,70	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	300%

		Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat ketersediaan sarana dan prasarana	1,14%								
2.13.02.1.01.01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	-	12 Kab, 1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	,-	,-	3 Dokumen	150%
2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	-	32 Desa (12 Kab), (1 dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	64 Desa, 5 dokumen	250%
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Desa yang terdampingi dalam pengaturan SOTK Pemerintahan Desa sesuai regulasi	24 Desa	59 Desa, 1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	200%	3 Dokumen	3 Dokumen	237 Desa, 6 dokumen	150%
		Jumlah usulan Pemekaran Desa yang terdampingi	2 Desa								
2.13.02.1.01.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tersalurkan bantuan dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan Desa	21 Desa	8 Unit	20 unit	20 unit	100%	66 Unit	104 Unit	7 Desa, 92 unit	383%
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	2,44%	1.249	1.629	0.651	0,000	0.380	1.846	3,746	986%
		Persentase BUMDes/ BUMDesma yang telah memanfaatkan Potensi Desa	2%								
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang terbina dalam pelaksanaan kerjasama desa antar kabupaten/kota/ jumlah total desa	1,62%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	300%
2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	-	17 Desa (1 dok)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	3 Dokumen	8 Dokumen	267%

2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	jumlah desa yang mengusulkan kerjasama desa dengan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	30 Desa	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	-	-	4 Dokumen	200%
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah BUMDesma kawasan perdesaan yang terdampingi dalam pengembangan Potensi	21 Bumdes dan 1 Bumdesma	6 Kab (1 dok)	5 dokumen	5 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	13 dokumen	300%
		Jumlah Bumdes/ BUMDesma di luar kawasan perdesaan yang terdampingi dalam pengembangan Potensi	45 Bumdes								
		Jumlah BUMDesma yang terdampingi dalam penyediaan sarana dan prasarana Pengembangan Usaha BUMDES/ BUMDESMA di luar kawasan perdesaan	12 Bumdes								
		Jumlah Pengurus BUMDes yang mengikuti Pembinaan Kewirausahaan BUMDes	2 kabupaten								
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah desa yang meningkat tata kelola Pemerintahannya	30,51%	10,152	5,429	13,572	249,99%	10,858	19,707	43,431	400%
		Persentase desa dan kelurahan kategori kurang berkembang yang meningkat statusnya	46,30%								
		Persentase peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat	80,29%								
		Persentase Desa yang tertata kewilayahannya sesuai regulasi	3,86%								
		Persentase BUMDes yang meningkat layanan usahanya	32%								

2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	5%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	300%
		Persentase Pemenuhan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)	100%								
		Persentase desa dan kelurahan yang terevaluasi perkembangannya	35,53%								
		Persentase desa yang meningkat ketersediaan data pemutahiran data Profil Desanya	11,02%								
		Persentase peningkatan fasilitas penetapan dan penegasan batas desa	2,05%								
		Persentase BUMDes yang meningkat kapasitasnya	32%								
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mengikuti Bimtek Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	30 Orang	49 Desa (2 dok)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	7 dokumen	350%
2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang ditetapkan	0	-	4 dokumen	4 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	-	0%
2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang terbina dalam Bimtek Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	30 Orang	5 Desa (5 Kab), (1 dok)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1	1 Desa	10 Desa (5 Kab) (2 dok)	100%

2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	4 Kab	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	-	-	36 Desa, 4 Kab 3 dok	100%
2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	-	-	-	-
2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	12 Kab	-	0%	-	-	-	-
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa dan kelurahan yang terevaluasi dalam perkembangan desa dan kelurahan (Epdeskel)	12 Desa, 13 Kelurahan	12 Desa/7 Kel di 13 Kab/Kota (2 dok)	3 Dokumen	2 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	5 dokumen	100%
		Jumlah Desa dan Kelurahan yang memenuhi tahapan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan	12 Desa, 13 Kelurahan								
2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Aparatur Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	100 Orang	5 Kab, 1 dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	67%	5 Dokumen	5 Dokumen	35 Desa (4 Dok)	80%
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Sekretaris Desa yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Administrasi Desa	40 Orang	112 org	100 org	100 org	100%	56 Orang	56 Orang	272 org	358%
		Jumlah tahapan pelaksanaan pelatihan P3PD	8 Kali								
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-	-	40 org	-	0%	-	-	-	-
2.13.04.1.01.12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	-	-	-	-
2.13.04.1.01.13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	-	-	-	-

2.13.04.1.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	-	-	-	-
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Jumlah Bumdes yang terbina dalam pengembangan kapasitas	167 Bumdes	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	-	0%
		Jumlah Bumdes yang memperoleh penyediaan sarana dan prasarana	26 Bumdes								
		Jumlah laporan pertemuan percepatan intervensi IKE dalam rekomendasi IDM	4 Laporan								
		Jumlah updating data bumdesa	1550 Bumdes								
2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang mengusulkan untuk diidentifikasi penetapan dan Penegasan Batas Desanya	4 Desa	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	-	0%
		Jumlah aparaturnya Desa yang mengikuti Bimtek Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25 Orang								
		Jumlah Kabupaten yang terdampingi dalam pengusulan perbup untuk Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7 Kabupaten								
2.13.04.1.01.17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	-	-	-	-
2.13.04.1.01.18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	-	-	-	-
2.13.04.1.01.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	-	-	-	-

2.13.04.1.01.20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	-	-	24 Desa	24 Desa	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Kabupaten yang terdampingi dalam pelaksanaan pekan Inovasi Perkembangan Desa	2 Kabupaten	-	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	-
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjalankan fungsinya	19,96%	2,320	1,448	2,776	100%	1,810	4,090	9,186	4602%
		Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat	24%	-			-	-	-	-	-
		Persentase Posyantek yang berdayaguna dalam penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	38%	-			-	-	-	-	-
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan fasilitas yang dipenuhi LKD dan TMMD	7,05%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	300%
		Persentase masyarakat miskin ekstreem yang dilibatkan dalam unit usaha BUMDes	14%								
		Persentase posyantek yang terbina dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pemberdayaan masyarakat	25%								
2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-	-	-	-

2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pengurus LKD yang dibina dalam penataan Kelembagaan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa	120 Orang	-	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	13 dokumen	433%
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pengurus LKD yang dibina dalam peningkatan Kapasitas (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	200 Orang	115 LKD	120 Lembaga	125 Lembaga	100%	125 Lembaga	125 Lembaga	365 Lembaga	133%
		Jumlah pengurus LKD yang mendapatkan sosialisasi tentang Pemanfaatan Pekarangan melalui Penyediaan Pangan Keluarga	75 Orang								
		Jumlah LKD yang terevaluasi dalam pelaksanaan Konvergensi Stunting	42 LKD								
2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana LKD yang tersedia (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	66 Paket	30 unit	43 Unit	43 Unit	100%	56 Unit	81 Unit	154 Unit	233%
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	90 Orang	92 Bumdes, UMK	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	259 BUMDesa, 4 dokumen	80%
		Jumlah masyarakat yang memperoleh sarana pengembangan Usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes	3 Unit								
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek yang mengikuti Bimtek Pengembangan Kapasitas Posyantek dalam penerapan dan Pemnafaatan Teknomogi Tepat Guna	40 Orang	6 Posyantek, 1 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	10 posyantek, 4 dokumen	67%

		Jumlah paket sarana pengembangan Potensi Desa melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang diberikan kepada masyarakat	2 Paket								
		Jumlah kabupaten/kota yang mengikuti gelar TTG Tingkat Nasional	12 Kabupaten								
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah pengurus LKD yang mendapatkan sosialisasi tentang nilai-nilai gotong royong	120 Orang								
2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Peralatan Pelaksanaan Program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) yang disediakan	164 Buah	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	150%
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Hasil Pembinaan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	310 PKK	11 Kab, 142 TP-PKK, 2 dokumen	6 Laporan	6 Laporan	100%	13 Laporan	13 Laporan	10 Laporan	100%
2.13.05.1.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.05.1.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 didukung oleh pendanaan yang digunakan secara efektif dan efisien. Adapun Realisasi Belanja Operasional dicapai 89.17 %.

- Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Alokasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 berdasarkan DDPa-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: DPPA/B.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 6 November 2023 adalah sebesar **Rp.30.707.729.396** terdiri dari:

- a) Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai) Rp. 9.778.989.747
- b) Belanja Langsung Rp. 20.918.739.649

Rincian realisasi belanja diuraikan sebagai berikut:

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	BELANJA OPRASIONAL	30,707,729,396	27,382,143,191	89.17
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13,975,671,872	11,541,970,375	82.59
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	683,147,950	660,184,312	96.64
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,965,000	60,939,760	99.96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	133,875,400	118,447,407	88.48
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	488,307,550	480,797,145	98.46
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9,868,989,547	7,844,404,901	79.49
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,505,159,747	6,512,562,106	76.57
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,283,830,000	1,255,491,495	97.79
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	79,999,800	76,351,300	95.44

	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH	65,449,900	62,849,900	96.03
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	65,449,900	62,849,900	96.03
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	418,305,725	165,590,900	39.59
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 183,780,900	Rp 183,658,700	99.93
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	50,000,000	46,170,000	92.34
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26,590,575	1,635,900	6.15
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85,774,700	77,690,000	90.57
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	72,159,550	40,095,000	55.56
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	939,664,901	857,856,477	91.29
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25,009,050	24,880,650	99.49
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	73,124,650	73,124,650	100.00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	24,499,626	24,467,726	99.87
	Penyediaan bahan logistik kantor	50,000,000	49,772,500	99.55
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,000,225	25,000,225	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	742,031,350	660,610,726	89.03
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1,283,575,841	1,260,358,527	98.19
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	287,150,000	284,950,000	99.23
	Pengadaan Mebel	112,690,536	112,645,485	99.96
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	882,735,305	862,763,042	97.74

	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1,000,000	470,480	47.05
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	200,768,808	187,363,258	93.32
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195,768,808	182,363,258	93.15
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	515,769,200	503,362,100	97.59
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	165,719,200	154,154,100	93.02
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204,050,000	204,050,000	100.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	146,000,000	145,158,000	99.42
2.	PROGRAM PENATAAN DESA	5,775,585,817	5,447,959,645	94.33
	PENATAUSAHAAN PENETAPAN SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN DESA ADAT	5,775,585,817	5,447,959,645	94.33
	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	41,800,000	39,050,000	93.42
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	50,000,200	49,146,895	98.29
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	5,683,785,617	5,359,762,750	94.30
3.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	307,494,950	289,020,110	93.99
	FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	307,494,950	289,020,110	93.99
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	56,681,300	54,261,320	95.73
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	250,813,650	234,758,790	93.60
4.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2,748,195,432	2,463,664,495	89.65
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	2,748,195,432	2,463,664,495	89.65

	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	251,810,850	246,380,051	97.84
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	31,500,050	31,500,050	100.00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	499,951,000	499,684,151	99.95
	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	204,265,600	193,298,508	94.63
	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	125,221,100	117,509,243	93.84
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	340,016,350	333,926,164	98.21
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	1,145,430,232	1,094,384,153	95.54
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	150,000,250	140,280,683	93.52
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	7,900,781,325	7,262,100,878	91.92
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,900,781,325	7,262,100,878	91.92
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	99,999,800	99,099,800	99.10
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	125,000,000	123,650,000	98.92
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5,142,201,846	4,607,785,696	89.61

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	363,072,407	346,850,185	95.53
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	99,020,300	93,704,330	94.63
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	50,000,000	49,263,500	98.53
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	81,395,284	80,253,550	98.60
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1,940,091,688	1,861,493,817	95.95
	30,707,729,396	27,382,143,191	89.17

- Capaian Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2023 merupakan tahun ke dua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dengan Tujuan Strategis “Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa” dengan indikator kinerja “Indeks Desa Membangun” dan Sasaran Strategis dengan indikator kinerja yaitu “Meningkatnya Status Perkembangan desa”. Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi %	Target	Realisasi %	Target	Realisasi %
1.	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa		Indeks Desa Membangun			0,6650	0,6706	0,6820	0,6978
2.		Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Presentase Desa Mandiri	-	1.03% 19 ds -	1.57% 29 ds	2,28% 42 ds -	3.37% 65 ds	7,17% 132 ds
3.			Presentase Desa Maju	-	18,78% 346 ds -	22,58% 416 ds	28,34% 522 ds -	37,19% 685 ds	36,16% 666 ds
4.			Presentase Desa Berkembang	-	59,50% 1.096 ds	58.42% 1.076 ds	54.02% 995 ds	49.67% 915 ds	48,49% 893 ds
5.			Presentase Desa Tertinggal	-	19,27% 355 ds	16.29% 300 ds	14.44% 266 ds	9.66% 178 ds	8.19% 151 ds
5.			Presentase Desa Sangat Tertinggal	-	1,41% 26 ds	1.14% 21 ds	0.92% 17 ds	0.11% 2 ds	0% 0 ds

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut: Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021 (Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023).

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah Tahun 2022-
2023 dan Prakiraan 2024-2025

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun					Tahun		Tahun		
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Desa Membangun		√	0.6650	0.6760	0.7178	0.7278	0.7378	0.6820	0.6978	0.7178	0.7278	
2	Persentase Desa Mandiri		√	1.574	7.166	10.858	17.372	16.938	2.280	7.166	10.858	17.372	
3	Persentase Desa Maju		√	22.584	36.156	48.100	58.958	51.357	28.339	36.156	48.100	58.958	
4	Persentase Desa Berkembang		√	58.415	48.480	38.871	23.670	31.705	54.017	48.480	38.871	23.670	
5	Persentase Desa Tertinggal		√	16.287	8.198	2.172	0.00	0.00	14.441	8.198	2.172	0.00	
6	Persentase Desa Sangat Tertinggal		√	1.140	-	0.00	0.00	0.00	0.923	0.000	0.00	0.00	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat sangat penting untuk dilakukan karena hal tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh ketersediaan SDM dan sarana prasarana serta pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Tidak tersedianya SDM yang mendukung dan sarana prasarana serta tidak terciptanya koordinasi, dan sinkronisasi yang baik akan menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kinerja.

- Kendala dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan Tupoksi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan;
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen dalam rangka sinergitas pelaksanaan program/kegiatan;
3. Kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak yang kurang mendukung terhadap pencapaian kinerja program/kegiatan;
4. Peraturan perundang-undangan yang belum dilengkapi dengan peraturan teknis sebagai penjabaran pelaksanaan tugas;

- Tantangan dan Peluang

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat tantangan dan peluang yang berasal dari lingkungan ekseternal dan lingkungan internal yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah yang secara langsung berdampak bagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis lingkungan internal

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi.

Identifikasi faktor internal:

1. Kekuatan

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategis dalam mencapai visi dan misi. Adapun kekuatan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

- a. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004
- b. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Oktober 2004 Nomor: 410/2917/SJ perihal Pengaturan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Juni 2005 Nomor: 410/1320/SJ perihal Institusi Pembina Penyelenggara Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- e. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.
- f. Tersedianya kuantitas SDM.
- g. Tersedianya Dana pada APBD.
- h. Tersedianya Sarana yang memadai.

2. Kelemahan

Kelemahan adalah situasi dan factor-faktor luar organisasi yang bersifat negative, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi.

Adapun kelemahan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Tupoksi yang masih tumpang tindih baik secara internal (antar bidang) maupun External (antar SKPD);
- b. Database dan System Information Management masih lemah.
- c. Terbatasnya Dana Operasional Kegiatan.
- d. Kinerja aparat yang belum optimal.
- e. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal.
- f. Tenaga fungsional belum terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas.

Analisis lingkungan eksternal:

Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical Succes Factors) bagi sesuatu organisasi dengan mengetahui kondisi eksternal organisasi akan dapat diketahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan eksternal diperlukan untuk meningkatkan peran organisasi dalam merespon setiap perubahan yang terjadi.

Lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi disekeliling organisasi yang berpengaruh pada kehidupan organisasi. Pemahaman pada lingkungan eksternal akan memberikan masukan pemahaman pada organisasi mengenai kondisi dan situasi organisasi.

Peluang

- a. Telah terbentuk Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Perkembangan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Adanya Program-program Kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Provinsi.
- c. Adanya Tenaga Pendampingan untuk Program Kegiatan dari tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
- d. Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader-kader pemberdayaan masyarakat.
- e. Adanya Kepedulian Masyarakat terhadap program-program Pemberdayaan serta dukungan partisipasi masyarakat.
- f. Partisipasi dan sumber daya alam di perdesaan.

Tantangan

- a. Target pengentasan desa tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah belum tercapai.
- b. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup besar;
- c. Luasnya wilayah perdesaan dan jumlah desa sasaran yang cukup banyak dalam pelaksanaan program kegiatan;
- d. Masih rendahnya pemahaman Pemerintah Desa dan Masyarakat terhadap hakekat Pemberdayaan;
- e. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pada Kelompok-kelompok masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di perdesaan;
- f. Prasarana dan sarana perdesaan yang kurang memadai;
- g. Belum optimalnya Pelayanan publik pemerintahan Desa.
- h. Keterpencilan lokasi desa, baik di kepulauan maupun di pegunungan.

Mengacu pada sasaran dan arah kebijakan nasional dan daerah yang telah ditetapkan, maka yang menjadi isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:

- a. Pembangunan desa yang diarahkan pada peningkatan perkembangan desa, dengan prioritas pengentasan desa tertinggal, mengurangi jumlah desa berkembang serta meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri.
- b. Penguatan Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Fasilitasi Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Dana Desa.
- c. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa secara berkelanjutan.
- d. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya dalam pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
- e. Peningkatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
- f. Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
- g. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (BUMDesa) dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

- h. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdesaan, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 maka kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, selengkapya kebutuhan program dan kegiatan dengan target dan pendanaan sebagaimana tabel terlampir:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
Periode / Tahun : 2024

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	Rp 6	7	8	9	10	Rp 11	12
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				24.589.214.182					25.531.165.961	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi dan 12 Kab	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71	12.287.787.828	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi dan 12 Kab	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71	12.947.150.717	
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	216.169.950	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	119.346.650	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	51.469.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	116.169.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	24.866.950	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan 2 Dokumen	43.009.900	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi	Capaian Realisasi Anggaran	100%	10.138.068.367	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	100%	10.483.027.353	
	Meningkatnya Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Kegiatan yang tepat waktu		Persentase Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Kegiatan yang tepat waktu	100%		Meningkatnya Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Kegiatan yang tepat waktu		Persentase Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Kegiatan yang tepat waktu	100%		
	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan Aset		Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100%		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan Aset		Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100%		
	Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)		TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	60%		Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)		TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	60%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	64 orang	8.717.788.367	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	64 orang	9.242.817.803	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi	Jumlah Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	12 Kegiatan	1.340.280.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi	Jumlah Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	12 Kegiatan	1.193.579.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	13 Laporan	80.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	13 Laporan	46.629.850	
	Tersusunnya laporan penyelesaian TLHP BPK dan APIP		Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK dan APIP	4 Laporan Hasil Penyelesaian TLHP		Tersusunnya laporan penyelesaian TLHP BPK dan APIP	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK dan APIP	4 Laporan Hasil Penyelesaian TLHP		
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Provinsi dan Kab	Persentase peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	70.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Provinsi dan Kab	Persentase peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	49.809.900	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Provinsi dan Kab	Jumlah Laporan Inventarisasi BMD dan laporan Barang Persediaan	2 Laporan	70.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Provinsi dan Kab	Jumlah Laporan Inventarisasi BMD dan laporan Barang Persediaan	2 Laporan	49.809.900	

	Tersusunnya Neraca aset		Jumlah Aset yang Tercatat	1 Laporan		Tersusunnya Neraca aset	Provinsi	Jumlah Aset yang Tercatat	1 Laporan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah)	60	215.788.050	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	60	53.704.850	
	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	26.220.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	11.219.850	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	25.574.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 org, 15 kali	90.134.150	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 org, 15 kali	42.485.000	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	73.859.900	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Dokumen	637.683.351	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	Persentase ketersediaan barang dan jasa penunjang pelayanan	100%	960.915.954	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	25.009.050	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	25.008.970	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	73.124.650	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	96.189.084	

	Penyediaan peralatan rumah tangga	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	24.499.626	Penyediaan peralatan rumah tangga	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	50.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	50.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	25.000.225	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	30.000.100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	440.049.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan 12 Kab	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	759.717.800	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	60	212.051.310	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	60	266.997.350	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	
	Pengadaan mebel	Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	41.721.310	Pengadaan mebel	Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	23.535.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 unit	170.330.000	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 unit	243.462.350	
	Terfasilitasinya Pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Fasilitas Pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah	1 Laporan		Terfasilitasinya Pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Fasilitas Pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah	1 Laporan		
	Pengadaan aset tetap lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan aset tetap lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	243.507.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	457.629.560	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	238.507.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	457.629.560	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	554.519.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	555.719.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 unit	159.719.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 unit	160.919.100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	194.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	194.800.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Paket	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Paket	200.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	
	Program Penataan Desa	12 Kab	Persentase Desa yang tertata Kelembagaan Pemerintahan Desanya	82%	3.770.000.000	Program Penataan Desa	12 Kab	Persentase Desa yang tertata Kelembagaan Pemerintahan Desanya	82%	2.820.522.580	

	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	12 Kab	Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat layanan kemasyarakatan	8,46%	3.770.000.000	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	12 Kab	Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat layanan kemasyarakatan	8,46%	2.820.522.580	
			Persentase desa yang terfasilitasi dalam penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa sesuai regulasi	8,70%		Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		Persentase desa yang terfasilitasi dalam penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa sesuai regulasi	8,70%		
			Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat ketersediaan sarana dan prasarana	1,14%				Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat ketersediaan sarana dan prasarana	1,14%		
	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	-	-	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	-	-	
	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	-	-	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	-	-	
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	12 Kab	Jumlah Desa yang terdampingi dalam pengaturan SOTK Pemerintahan Desa sesuai regulasi	24 Desa	60.000.000	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	12 Kab	Jumlah Desa yang terdampingi dalam pengaturan SOTK Pemerintahan Desa sesuai regulasi	24 Desa	59.999.950	

			Jumlah usulan Pemekaran Desa yang terdampingi	2 Desa				Jumlah usulan Pemekaran Desa yang terdampingi	2 Desa		
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah desa yang tersalurkan bantuan dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan Desa	21 Desa	3.710.000.000	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah desa yang tersalurkan bantuan dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan Desa	21 Desa	2.760.522.630	
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	12 Kab	Persentase Desa yang terbina dalam pelaksanaan kerjasama desa antar kabupaten/kota/ jumlah total desa	2,44%	340.000.000	Program Peningkatan Kerjasama Desa	12 Kab	Persentase Desa yang terbina dalam pelaksanaan kerjasama desa antar kabupaten/kota/ jumlah total desa	2,44%	345.000.050	
			Persentase BUMDes/ BUMDes ma yang telah memanfaatkan Potensi Desa	2%				Persentase BUMDes/ BUMDes ma yang telah memanfaatkan Potensi Desa	2%		
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	12 Kab	Persentase Desa yang terbina dalam pelaksanaan kerjasama desa antar kabupaten/kota/ jumlah total desa	1,62%	340.000.000	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	12 Kab	Persentase Desa yang terbina dalam pelaksanaan kerjasama desa antar kabupaten/kota/ jumlah total desa	1,62%	345.000.050	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	-	-	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	-	-	
	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	12 Kab	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	30 Desa	100.000.000	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	12 Kab	jumlah desa yang mengusulkan kerjasama desa dengan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	30 Desa	100.000.100	

	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Parigi Moutong, Poso, Donggala, Sigi, Buol, Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	21 Bumdes dan 1 Bundesma	240.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Parigi Moutong, Poso, Donggala, Sigi, Buol, Morowali	Jumlah BUMDesma kawasan perdesaan yang terdampangi dalam pengembangan Potensi	21 Bumdes dan 1 Bundesma	244.999.950	
			Jumlah Bumdes/ BUMDesma di luar kawasan perdesaan yang terdampangi dalam pengembangan Potensi	45 Bumdes				Jumlah Bumdes/ BUMDesma di luar kawasan perdesaan yang terdampangi dalam pengembangan Potensi	45 Bumdes		
			Jumlah BUMDesma yang terdampangi dalam penyediaan sarana dan prasarana Pengembangan Usaha BUMDES/ BUMDESMA di luar kawasan perdesaan	12 Bumdes				Jumlah BUMDesma yang terdampangi dalam penyediaan sarana dan prasarana Pengembangan Usaha BUMDES/ BUMDESMA di luar kawasan perdesaan	12 Bumdes		
			Jumlah Pengurus BUMDes yang mengikuti Pembinaan Kewirausahaan BUMDes	30 orang				Jumlah Pengurus BUMDes yang mengikuti Pembinaan Kewirausahaan BUMDes	2 kabupaten		
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	12 Kab	Persentase Pemerintah Desa yang meningkat tata kelola Pemerintahannya	30.51%	2.175.000.000	Program Administrasi Pemerintahan Desa	12 Kab	Persentase Pemerintah Desa yang meningkat tata kelola Pemerintahannya	30.51%	2.484.320.637	
			Persentase Pemerintah Desa yang meningkat tata kelola Pemerintahannya	30.51%	2.484.320.637			Persentase desa dan kelurahan kategori kurang berkembang yang meningkat statusnya	46,30%		
			Persentase desa dan kelurahan kategori kurang berkembang yang meningkat statusnya	46,30%				Persentase peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat	80,29%		

			Persentase peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat	80,29%				Persentase Desa yang tertata kewilayahannya sesuai regulasi	3,86%		
			Persentase Desa yang tertata kewilayahannya sesuai regulasi	3,86%				Persentase BUMDes yang meningkat layanan usahanya	32%		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Kab	Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	32%		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Kab	Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	5%		
	Tercapainya Pemenuhan tahapan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)		Persentase desa dan kelurahan yang terevaluasi perkembangannya	35,53%		Tercapainya Pemenuhan tahapan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)		Persentase Pemenuhan tahapan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)	100%		
			Persentase desa yang meningkat ketersediaan dan pemutahiran data Profil Desanya	11,02%				Persentase desa dan kelurahan yang terevaluasi perkembangannya	35,53%		
			Persentase peningkatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	2,05%				Persentase desa yang meningkat ketersediaan dan pemutahiran data Profil Desanya	11,02%		
			Persentase BUMDes yang meningkat kapasitasnya	32%				Persentase peningkatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	2,05%		
			Persentase desa dan kelurahan yang terevaluasi perkembangannya	35,53%				Persentase BUMDes yang meningkat kapasitasnya	32%		

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	-	-	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	-	
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mengikuti Bimtek Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	30 Orang	115.000.000	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mengikuti Bimtek Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	30 Orang	114.999.800
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	-	50.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	-	-
	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	12 Kab	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang terbina dalam Bimtek Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	30 Orang	-	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	12 Kab	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang terbina dalam Bimtek Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	30 Orang	104.829.900
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-	-
	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Kab	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Kab	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Desa dan 13 Kelurahan	115.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Desa dan 13 Kelurahan	115.000.100

			Jumlah Desa dan Kelurahan yang memenuhi tahapan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan	12 Desa dan 13 Kelurahan				Jumlah Desa dan Kelurahan yang memenuhi tahapan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan	12 Desa dan 13 Kelurahan		
	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	12 Kab	Jumlah Aparatur Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	100 Orang	130.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	12 Kab	Jumlah Aparatur Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	100 Orang	129.999.900	
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	12 Kab	Jumlah Sekretaris Desa yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Administrasi Desa	40 Orang	135.000.000	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	12 Kab	Jumlah Sekretaris Desa yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Administrasi Desa	40 Orang	135.000.150	
	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	12 Kab	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-	-	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	12 Kab	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-	-	
	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	-	-	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	-	-	
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	-	-	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	-	-	

	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	-	-	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	-	-	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	12 Kab	Jumlah Bumdes yang terbina dalam Pengembangan Kapasitas	107 Bumdes	1.824.490.737	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	12 Kab	Jumlah Bumdes yang terbina dalam Pengembangan Kapasitas	107 Bumdes	1.824.490.737	
			Jumlah Bumdes yang memperoleh penyediaan sarana dan prasarana	38 Bumdes				Jumlah Bumdes yang memperoleh penyediaan sarana dan prasarana	38 Bumdes		
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Kab	Jumlah Desa yang mengusulkan untuk diidentifikasi penetapan dan Penegasan Batas Desanya	4 Desa	60.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Kab	Jumlah Desa yang mengusulkan untuk diidentifikasi penetapan dan Penegasan Batas Desanya	4 Desa	60.000.050	
			Jumlah aparatur Desa yang mengikuti Bimtek Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25 Orang				Jumlah aparatur Desa yang mengikuti Bimtek Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25 Orang		
			Jumlah Kabupaten yang terdampangi dalam pengusulan perbup untuk Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7 Kabupaten				Jumlah Kabupaten yang terdampangi dalam pengusulan perbup untuk Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7 Kabupaten		
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	-	-	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	-	-	
	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	-	-	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	-	-	

	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	
	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	12 Kab	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	-	-	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	12 Kab	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	-	-	
	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	12 Kab	Jumlah kabupaten yang terdampangi dalam pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	2 Kabupaten	-	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	12 Kab	Jumlah kabupaten yang terdampangi dalam pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	2 Kabupaten	-	
	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	-	-	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	-	-	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1,810	6.016.426.354	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjalankan fungsinya	19,96%	6.934.171.977	
			Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat	24%				Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat	24%		

			Persentase Posyantek yang berdayaguna dalam penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	38%				Persentase Posyantek yang berdayaguna dalam penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	38%		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Kab	Persentase kebutuhan fasilitasi yang dipenuhi LKD dan TMMD	1 Laporan	6.016.426.354	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Kab	Persentase kebutuhan fasilitasi yang dipenuhi LKD dan TMMD	7,05%	6.934.171.977	
			Persentase masyarakat miskin ekstrem yang dilibatkan dalam unit usaha BUMDes	14%				Persentase masyarakat miskin ekstrem yang dilibatkan dalam unit usaha BUMDes	14%		
			Persentase posyantek yang terbina dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pemberdayaan masyarakat	25%				Persentase posyantek yang terbina dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pemberdayaan masyarakat	25%		
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-	-	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-	-	

	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah pengurus LKD yang dibina dalam penataan Kelembagaan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa	120 Orang	100.000.150	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah pengurus LKD yang dibina dalam penataan Kelembagaan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa	120 Orang	100.000.400	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	200 Orang	386.425.700	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	Jumlah pengurus LKD yang dibina dalam peningkatan kapasitas (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200 Orang	416.425.850	
		12 Kab	Jumlah pengurus LKD yang mendapatkan sosialisasi tentang Pemanfaatan Pekarangan melalui Penyediaan Pangan Keluarga	75 Orang				Jumlah pengurus LKD yang mendapatkan sosialisasi tentang Pemanfaatan Pekarangan melalui Penyediaan Pangan Keluarga	75 Orang		
		12 Kab	Jumlah LKD yang terevaluasi dalam pelaksanaan Konvergensi Stunting	42 LKD				Jumlah LKD yang terevaluasi dalam pelaksanaan Konvergensi Stunting	42 LKD		
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat	12 Kab	Jumlah paket sarana dan prasarana LKD yang tersedia (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	66 Paket	4.010.000.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat	12 Kab	Jumlah paket sarana dan prasarana LKD yang tersedia (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	66 Paket	4.649.248.317	

	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Kab	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan Bimtek Pengembangan kewirausahaan	90 Orang	705.000.154	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Kab	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan Bimtek Pengembangan kewirausahaan	90 Orang	395.505.108	
			Jumlah masyarakat yang memperoleh sarana pengembangan Usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes	3 Unit				Jumlah masyarakat yang memperoleh sarana pengembangan Usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes	3 Unit		
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Kab	Jumlah posyantek yang mengikuti Bimtek Pengembangan Kapasitas Posyantek dalam penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	40 Orang	215.000.150	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Kab	Jumlah posyantek yang mengikuti Bimtek Pengembangan Kapasitas Posyantek dalam penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	40 Orang	272.991.834	
			Jumlah paket sarana pengembangan Potensi Desa melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang diberikan kepada masyarakat	2 Paket				Jumlah paket sarana pengembangan Potensi Desa melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang diberikan kepada masyarakat	2 Paket		
			Jumlah kabupaten/kota yang mengikuti gelar TTG Tingkat Nasional	12 Kabupaten				Jumlah kabupaten/kota yang mengikuti gelar TTG Tingkat Nasional	12 Kabupaten		
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	12 Kab	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	12 Kab	Jumlah Laporan Hasil pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	50.000.100	

			Jumlah pengurus LKD yang mendapatkan sosialisasi tentang nilai-nilai gotong royong	120 Orang				Jumlah pengurus LKD yang mendapatkan sosialisasi tentang nilai-nilai gotong royong	120 Orang		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	164 Buah	50.000.200		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah peralatan Pelaksanaan Program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) yang disediakan	164 Buah	50.000.268	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kab	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	310 PKK	500.000.000		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Hasil Pembinaan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	310 PKK	1.000.000.100	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-		Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	-	-		Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	-	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis terkait pemberdayaan masyarakat dan desa, maka melalui Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dilakukan upaya konkrit untuk menjawab isu-isu strategis tersebut yaitu dengan memperhatikan usulan dari masyarakat. Usulan program dan kegiatan dari pemangku jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Perangkat
Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
Periode / Tahun : 2024

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENATAAN DESA		Presentase Kelembagaan Desa yang ditata Sesuai Standar		
	Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Rp 2,606,055,580	
		- Desa Alindau Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala			
		- Desa Batusuya Goo, Kec. Tambusabora, Kab. Donggala			
		- Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Sidoan Barat, Kec. Sidoan, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Tuladenggi Sibatang, kecamatan Taopa, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Kalora, Kec. Kinovaro, Kab. Sigi			
		- Desa Matantimali, Kec. Marawola Barat, Kab. Sigi			
		- Desa Sausu Peore, Kec. Sausu, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Tombi, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Tompo, Kec. Taopa, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Laemanta Utara Kec. Kasimbar Kab Parimo			
		- Desa Ogomolos Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong			

		- Desa Sidoan Kec. Sidoan Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Moutong Tengah, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Sumber Agung, Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Dongkas Dinas BPMD Kec. Tinombo Kab. Parimo			
		- Desa Desa Tanioge			
		- Desa Betue, Kec. Lore Peore, Kab. Poso			
		- Desa Kalimago Kec. Lore Timur, Kab. Poso			
		- Desa Maholo, Kec. Lore Timur, Kab. Poso			
		- Desa Masamba, Desa Masamba Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso			
		- Desa Watutau, Kec. Lore Peore, Kab. Poso			
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang di Kelola secara Efektif dan Efisien		
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan BUMDesa Kab/Kota dan Lembaga Kerjasama Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Rp 1,294,914,037	
		- Desa Ambesia Selatan, Kec. Tomini, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Bugis Utara, Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Mensung Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Parigimpu, Kec. Parigi Barat, Kab. Parigi Moutong			
		- Kelurahan Loji, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Bolapapu, Kec. Kulawi, Kab. Sigi			
		- Desa Ambesia Selatan, Kec. Tomini, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Donggulu, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Sindangsari Kec. Toili Barat Kab. Banggai			
		- Kabupaten Poso			

	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten		
	Sub Kegiatan :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 4,286,979,617	
		- Desa Tangkura, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso			
		- Desa Balumpewa, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi			
		- Desa Ongulara Dusun IV Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala			
		- Dusun Putia Desa Lumbulama Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala			
		- Desa Watatu Dusun II, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala			
		- Kelurahan Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu			
		- Desa Pusungi, Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-una			
		- Desa Gimpu, Kec. Kulawi, Kab. Sigi			
		- Desa Mekar Jaya, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai			
		- Desa Taopa, Kec. Taopa, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Tirta Jaya, Kec. Toili Jaya, Kab. Banggai			
		- Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli			
		- Kelurahan Tondo, Mantikulore, Kota Palu			

	- Kelurahan Poboya Kec. Mantikulore Kota Palu			
	- BTN Petobo Permai, Kec. Palu Selatan, Kota Palu			
	- Kabonena, Ulujadi, Kota Palu			
	- Kelurahan Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu			
	- Kelurahan Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu			
	- Kelurahan Kamonji			
	- Kelurahan Palupi, Kec. Tatanga, Kota Palu			
	- Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu			
	- Kelurahan Ujuna, Palu Barat, Kota Palu			
	- Kelurahan Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu			
	- Kelurahan Boyaoge Kec. Tatanga, Kota Palu			
	- Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu			
	- Lolu Selatan, Birobuli Selatan, Kota Palu			
	- Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu			
	- Kelurahan Tatura Utara, Palu Selatan, Kota Palu			
	- Kelurahan Baru Kec. Palu Barat, Kota Palu			
	- Kelurahan Mamboro Barat, Kec. Palu Utara, Kota Palu			
	- Kelurahan Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu			
	- Kompleks Perumnas Silae Kelurahan Silae, Kec. Ulujadi			
	- Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu			
	- Kelurahan Palupi, Tatanga, Kota Palu , Kota Palu			
	- Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu			
	- Kelurahan Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota Palu			
	- Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu			
	- Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-una			
	- Kec. Toili, Kab. Banggai			
	- Desa Towera, Kec. Siniu, Kab. Parigi Moutong			
	- Desa Supilopong, Kec. Tomini, Kab. Parigi Moutong			

		- Kelurahan Boyaoge, Jl. Kenari, Kec. Tatanga, Kota Palu			
		- Kelurahan Maesa Jl. Wolter Monginsidi No. 48 Kel. Maesa			
		- Desa Tolokibit, Kec. Banggai Selatan, Kab. Banggai Laut			
		- Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga, Kab. Parigi Moutong			
		- Desa Timbong, Kec. Banggai Tengah, Kab. Banggai Laut			
		- Desa Sindangsari, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai			
		- Desa Kilo, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso			
		- Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una			
		- Kelurahan Lasoani Kec. Mantikulore, Kota Palu			
		- Kelurahan Palupi, Kec. Tatanga, Kota Palu			
		- Kelurahan Tatura Selatan, Kec. Tatura Selatan, Kota Palu			
		- Kelurahan Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu			
		- Desa Bulili Kec. Lore Selatan Kab. Poso			
		- Desa Kaduwaa Kec. Lore Utara Kab. Poso			
		- Desa Kageroa Kec. Lore Barat Kab. Poso			
		- Desa Rompo Kec. Lore Tengah Kab. Poso			
		- Desa Sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una			
		- Desa Tojo Kec. Tojo Kab. Tojo Una-una			
		- Desa Kawende, Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso			
		- Desa Patingko, Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una			
		- Desa Tampabatu, Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-una			
		- Desa Try Mulya Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso			
		- Desa Bonebae 2 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-una			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah, selanjutnya kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa termuat pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 12 point g pada urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan Pemerintah dalam berbagai cara diantaranya dengan menempatkan desa sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan pembangunan, hal ini didasari pemahaman bahwa desa memiliki posisi sangat strategis dalam penyelenggaraan berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana desa memiliki peran sebagai pendorong tumbuhnya potensi-potensi lokal desa di berbagai bidang yang ada. Selanjutnya untuk memposisikan desa sebagai motor penggerak utama pembangunan di desa maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan peran yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, termasuk dalam memberikan peran yang maksimal kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa. Desa yang pada beberapa

dekade hanya menjadi obyek pembangunan, maka dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa tersebut menjadikan desa memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang mampu mendorong bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan aturan pemberian insentif/penghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih fokus bekerja dalam melayani masyarakatnya.

Melalui Undang-undang Desa terbuka ruang yang luas bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak hanya dana dan kewenangan kepala desa yang istimewa, tetapi undang- undang ini melengkapi dengan pengaturan penguatan kapasitas masyarakat desa dan pembangunan desa melalui pilar-pilar lembaga kemasyarakatan di desa, lembaga ekonomi desa dan peluang kerjasama antar desa, sehingga memungkinkan desa untuk terbuka sehingga berkembang lebih pesat secara bersama.

Sejak beberapa dekade Pemerintahan Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinilai menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya, namun dalam pelaksanaannya tetap diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada

Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi penting.

Dalam menjaga sinergitas pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintah daerah. Adapun kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien.
2. Berkembangnya status Pembangunan Desa.
3. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebagai Lembaga Teknis yang bertugas membantu Gubernur Sulawesi Tengah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dalam Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dirumuskan arah kebijakan guna pencapaian tujuan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi penguatan penataan kelembagaan desa guna penataan desa sesuai standar.
2. Fasilitasi penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Fasilitasi penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan yang didukung oleh Lembaga Ekonomi Masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana serta Teknologi Tepat Guna (TTG).
4. Fasilitasi penguatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat dalam pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai aktor perubahan sosial, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan pelestarian adat.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tujuan Pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah adalah **“Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa”** dengan indikator Tujuan **“Indeks Desa Membangun”**.

Adapun Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dicapai adalah **Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa** dengan indikator **“Indeks Desa Membangun”**.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator serta target untuk pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target kinerja Tujuan dan Sasaran Thn 2024
1	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7178
		Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7178

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- Visi Misi

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016 – 2026, bahwa visi pembangunan daerah adalah **Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**, dan merumuskan 9 Misi Pembangunan di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spiritual Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan alam, Antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun didalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di Luar Provinsi Bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara Sistematis dan Digital.
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Berdasarkan RPJMD dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah menjabarkan arahan RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu Gubernur Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan mendukung misi sebagai berikut:

➤ **Misi ke- 2** Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spiritual Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM menfokuskan pada tujuan:

- Tujuan 2.1; Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government) dengan sasaran:

1) Sasaran 2.1.1.

Terwujudnya tata Kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisiensi dan transparan) melalui strategi:

- Strategi 2.1.1.1
Meningkatkan akuntabilitas kinerja administrasi pemerintah.
- Strategi 2.1.1.2
Menerapkan manajemen talenta dan manajemen kinerja aparatur.
- Strategi 2.1.1.3
Menerapkan pola karir ASN.
- Strategi 2.1.1.4
Memberikan reward and punishment terhadap ASN.

Arah kebijakan RB Nasional 2020–2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam RB General; kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam RB Tematik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik bertujuan untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Melalui RB Tematik, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik.

Reformasi Birokrasi Tematik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang mengamanatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu perangkat daerah pengampuh penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan selanjutnya dilaksanakan melalui bimbingan teknis kewirausahaan bagi masyarakat miskin berdasarkan data P3KE.

- **Misi ke- 3** Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan dengan menfokuskan pada tujuan:

- Tujuan 3.2

Menurunkan kemiskinan, dengan sasaran:

1). Sasaran 3.2.2

Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa melalui strategi:

- Strategi 3.2.2.1

Meningkatkan kinerja pembangunan desa.

Sebagai Perangkat Daerah pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, maka pelaksanaan kinerja yang dituangkan dalam program/kegiatan pada tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui strategi-strategi sebagai berikut;

1. Pembangunan desa yang diarahkan pada peningkatan perkembangan desa, dengan mengurangi jumlah desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang serta meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri. Berdasarkan Indeks Desa Membangun ditargetkan pada tahun 2024 tidak ada lagi desa sangat tertinggal dan selanjutnya pada tahun 2025 ditargetkan tidak terdapat desa tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Penguatan Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Fasilitasi Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Dana Desa.
3. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa secara berkelanjutan.
4. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya dalam pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
5. Peningkatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

6. Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
7. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (BUMDesa) dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdesaan, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Implementasi strategi-strategi tersebut diatas dalam upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam aktivitas sosial dan ekonominya, akan tetapi permasalahan yang sering timbul adalah pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga ekonomi desa serta masyarakat miskin itu sendiri belum mampu untuk menjaga keberlangsungan hasil yang diperoleh masyarakat miskin dari program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan.

Selain itu selama ini upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui program-program pemberdayaan masyarakat belum dapat tercapai secara optimal karena terdapat berbagai kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan kewenangan, alokasi anggaran yang minim, koordinasi dan sinergitas program belum berjalan dengan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten serta pemanfaatan data penduduk miskin (by name& by addres) belum dilakukan.

- **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja untuk pencapaian tujuan Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah 5 Program,

Kegiatan penunjang urusan pemerintah provinsi, 4 kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, 27 sub kegiatan penunjang urusan pemerintah provinsi dan 40 sub kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Bidang Sekretariat yakni Kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub Kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
3. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD;
4. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
6. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan Sub Kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
7. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

(2). Program Penataan Desa

Program ini menunjang Terselenggaranya Kegiatan Penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa dan Desa Adat, dengan Sub Kegiatan terdiri dari:

- Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi Kewenangan Provinsi.
- Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat.
- Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa.
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintah Desa.

(3) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini mendukung pencapaian Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi, adapun Sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

(4) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, Adapun Sub Kegiatan yang Dilaksanakan terdiri dari;

- Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa;
- Pembinaan Manajemen Pemerintah Desa;
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
- Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa;
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
- Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan;
- Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa;
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
- Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa.
- Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa.
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa.

- Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota.
- Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa.
- Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa.
- Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota.

(5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini menunjang Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota, adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa;

- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
- Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat;
- Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah akan dilaksanakan di 12 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun penyebaran lokasi dan analisis kebutuhan dana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Periode Tahun : 2024

Prakiraan Maju : 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				25.531.165.961				23.544.770.000
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	71	12.947.150.717	PAD, DTU, DAU, PENDAPATAN		72	16.788.490.000
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	80	119.346.650	PAD		83	834.954.370
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	Provinsi	5 dokumen	51.469.800	PAD		5 dokumen	200.003.280
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	3 Laporan	24.866.950	PAD		3 laporan	250.000.000
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	4 Laporan 2 Dokumen	43.009.900	PAD		2 Laporan	384.951.090
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	Provinsi	100%	10.483.027.353	PAD, DTU, DAU, PENDAPATAN		97	11.976.365.780
		Persentase Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Kegiatan yang tepat waktu		100%					
		Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu		100%					

		TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah		60%					
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	Provinsi	64 orang/bulan	9.242.817.803	DTU, DAU, PENDAPATAN		72 orang/bulan	9.802.365.780
2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	Provinsi	12 Kegiatan	1.193.579.700	PAD		1 Dokumen	2.054.000.000
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Provinsi	13 Laporan	46.629.850	PAD		3 Laporan	120.000.000
		Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK dan APIP		4 Laporan Hasil Penyelesaian TLHP					
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Provinsi dan Kab	100	49.809.900	PAD		1 Dokumen	200.000.000
		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah				PAD		1 Laporan	200.000.000
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Inventarisasi BMD dan laporan Barang Persediaan	Provinsi dan Kab	2 Laporan	49.809.900	PAD		1 Laporan	200.000.000
		Jumlah aset yang tercatat		1 Laporan					
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Provinsi	60	53.704.850	PAD		70	920.000.000
2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi	-	-	PAD		1 paket	220.000.000
2.13.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi	1 Dokumen	11.219.850	PAD		1 Dokumen	200.000.000

2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	-	-	PAD		1 Laporan	200.000.000
2.13.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	12 org, 5 kali	42.485.000	PAD		14 orang, 3 kali	100.000.000
2.13.01.1.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Provinsi dan 12 Kab	-	-	PAD		8 orang, 2 kali	200.000.000
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan kebutuhan barang dan jasa penunjang pelayanan	Provinsi dan 12 Kab	100%	960.915.954	PAD		1 Dokumen	1.030.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa				PAD		1 Laporan	1.030.000.000
2.13.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi	1 paket	25.008.970	PAD		1 paket	100.000.000
2.13.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi	2 paket	96.189.084	PAD		2 paket	300.000.000
2.13.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi	-	-	PAD		1 paket	100.000.000
2.13.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi	4 paket	50.000.000	PAD		4 paket	100.000.000
2.13.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi	1 paket	30.000.100	PAD		1 paket	110.000.000

2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan 12 Kab	12 Laporan	759.717.800	PAD		3 Laporan	320.000.000
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	Provinsi	60	266.997.350	PAD		1 Dokumen	825.000.000
		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				PAD		1 Laporan	825.000.000
2.13.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi	-	-	PAD		2 Unit	400.000.000
2.13.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi	2 paket	23.535.000	PAD		20 Set	200.000.000
2.13.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi	23 unit	243.462.350	PAD		2 paket	200.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah		1 Laporan					
2.13.01.1.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	-	-	PAD		1 paket	25.000.000
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	100%	457.629.560	PAD		1 Laporan	260.000.000
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Provinsi	-	-	PAD		4 Laporan	10.000.000

2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi	12 Laporan	457.629.560	PAD		12 bulan	250.000.000
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	100%	555.719.100	PAD		1 Dokumen	742.169.850
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				PAD		1 Laporan	742.169.850
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi	34 unit	160.919.100	PAD		18 unit	180.000.000
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi	72 Unit	194.800.000	PAD		2 unit	100.000.000
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	1 Paket	200.000.000	PAD		1 unit	100.000.000
2.13.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Provinsi	-	-	PAD		2 paket	362.169.850
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang tertata Kelembagaan Pemerintahan Desa	12 Kab	82%	2.820.522.580	PAD		84%	2.002.350.000
		Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat layanan kemasyarakatan		8,46%					
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Persentase desa yang terfasilitasi dalam penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa sesuai regulasi	12 Kab	8,70	2.820.522.580	PAD		1 Laporan	1.802.350.000

		Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat ketersediaan sarana dan prasarana		1,14%					
2.13.02.1.01.01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	12 Kab	,-	-	PAD		2 Dokumen	110.000.000
2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	12 Kab	-	-	PAD		2 Dokumen	220.000.000
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Desa yang terdampingi dalam pengaturan SOTK Pemerintahan Desa sesuai regulasi	12 Kab	24 Desa	59.999.950	PAD		2 Dokumen	320.000.000
		Jumlah usulan Pemekaran Desa yang terdampingi	2 Kab	2 Desa					
2.13.02.1.01.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tersalurkan bantuan dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Pemerintahan Desa	12 Kab	21 Desa	2.760.522.630	PAD		20 unit	1.352.350.000
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	12 Kab	2,44%	345.000.050	PAD		2,64%	230.480.000
		Persentase BUMDes/BUMDesma yang telah memanfaatkan Potensi Desa	12 Kab	2%				4%	
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang terbina dalam pelaksanaan kerjasama desa antar kabupaten/kota/jumlah total desa	12 Kab	1,62%	345.000.050	PAD		1,82%	380.480.000
2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	12 Kab	-	-	PAD		-	100.000.000
2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	jumlah desa yang mengusulkan kerjasama desa dengan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	12 Kab	30 Desa	100.000.100	PAD		30 Desa	100.000.000

2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah BUMDesma kawasan perdesaan yang terdampangi dalam pengembangan Potensi	Kab. Parigi Moutong, Poso, Donggala, Sigi, Buol, Morowali	21 Bumdes dan 1 Bundesma	244.999.950	PAD		10 Dokumen	180.480.000,00
		Jumlah Bumdes/ BUMDesma di luar kawasan perdesaan yang terdampangi dalam pengembangan Potensi		45 Bumdes					
		Jumlah BUMDesma yang terdampangi dalam penyediaan sarana dan prasarana Pengembangan Usaha BUMDES/ BUMDESMA di luar kawasan perdesaan		12 Bumdes					
		Jumlah Pengurus BUMDes yang mengikuti Pembinaan Kewirausahaan BUMDes		30 orang					
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah desa yang meningkat tata kelola Pemerintahannya	12 Kab	30,51%	2.484.320.637	PAD		32,51%	1.525.820.000
		Persentase desa dan kelurahan kategori kurang berkembang yang meningkat statusnya		46,30%				42,30%	
		Persentase peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat		80,29%				82,29%	
		Persentase Desa yang tertata kewilayahannya sesuai regulasi		3,86%				4,06%	
		Persentase BUMDes yang meningkat layanan usahanya		32%				34%	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	12 Kab	5%	2.484.320.637	PAD		7%	875.820.000
		Persentase desa dan kelurahan yang terevaluasi perkembangannya		35,53%				37,53%	

		Persentase desa yang meningkatkan ketersediaan dan pemutahiran data Profil Desanya		11,02%				13,02%	
		Persentase peningkatan fasilitas penetapan dan penegasan batas desa		2,05%				4,05%	
		Persentase BUMDes yang meningkat kapasitasnya		32%				34%	
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	12 Kab	-	-	PAD		5 Dokumen	20.000.000
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mengikuti Bimtek Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	12 Kab	30 Orang	114.999.800	PAD		4 Dokumen	100.000.000
2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yangDitetapkan	12 Kab	-	-	PAD		5 Dokumen	20.000.000
2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang terbina dalam Bimtek Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	12 Kab	30 Orang	104.829.900	PAD		4 Dokumen	100.000.000
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	12 Kab	-	-	PAD		3 Dokumen	50.000.000
2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	12 Kab	-	-	PAD		3 Dokumen	50.000.000
2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	12 Kab	-	-	PAD		12 Kab	20.000.000
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanak oleh Desa	12 Kab	12 Desa dan 13 Kelurahan	115.000.100	PAD		3 Dokumen	164.000.000

		Jumlah Desa dan Kelurahan yang memenuhi tahapan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan	12 Desa dan 13 Kelurahan	12 Desa dan 13 Kelurahan					
2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Aparatur Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	12 Kab	100 Orang	129.999.900	PAD		3 Dokumen	169.820.000
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Sekretaris Desa yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Administrasi Desa	12 Kab	40 Orang	135.000.150	PAD		100 org	180.000.000
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	12 Kab	-	-	PAD		40 org	50.000.000
2.13.04.1.01.12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	12 Kab	-	-	PAD		6 Dokumen	50.000.000
2.13.04.1.01.13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasn Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Kab	-	P -	PAD		6 Dokumen	24.000.000
2.13.04.1.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	12 Kab	-	-	PAD		6 Dokumen	24.000.000
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Jumlah Bumdes yang terbina dalam Pengembangan Kapasitas	12 Kab	107 BumDes	1.824.490.737	PAD		2 Dokumen	150.000.000
		Jumlah Bumdes yang memperoleh penyediaan sarana dan prasarana		38 BUMDes					
2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang mengusulkan untuk diidentifikasi penetapan dan Penegasan Batas Desanya	12 Kab	4 Desa	60.000.050	PAD		2 Dokumen	140.000.000

		Jumlah aparaturnya Desa yang mengikuti Bimtek Penetapan dan Pengawasan Batas Desa		25 Orang					
		Jumlah Kabupaten yang terdamping dalam pengusulan perbup untuk Penetapan dan Pengawasan Batas Desa		7 Kabupaten					
2.13.04.1.01.17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	12 Kab	-	-	PAD		6 Dokumen	24.000.000
2.13.04.1.01.18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	12 Kab	-	-	PAD		3 Dokumen	40.000.000
2.13.04.1.01.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Kab	-	-	PAD		1 Laporan	40.000.000
2.13.04.1.01.20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	12 Kab	-	-	PAD		24 Desa	20.000.000
2.13.04.1.01.21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah kabupaten yang terdamping dalam pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	12 Kab	2 Kabupaten	-	PAD		1 Laporan	70.000.000
2.13.04.1.01.22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	12 Kab	-	-	PAD		2 Dokumen	20.000.000
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjalankan fungsinya	12 Kab	19,96%	6.934.171.977	PAD		21,96%	3.847.630.000
		Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat		24%				25%	
		Persentase Posyantek yang berdayaguna dalam penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		38%				39%	

2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan fasilitasi yang dipenuhi LKD dan TMMD	12 Kab	7,05%	6.934.171.977	PAD		1 Laporan	3.947.630.000
		Persentase masyarakat miskin ekstrem yang dilibatkan dalam unit usaha BUMDes	12 Kab	14%					
		Persentase posyantek yang terbina dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Gna untuk pemberdayaan masyarakat	12 Kab	25%					
2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	-	-	PAD		2 Dokumen	150.000.000
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah pengurus LKD yang dibina dalam penataan Kelembagaan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa	12 Kab	120 Orang	100.000.400	PAD		13 Dokumen	250.000.000
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah pengurus LKD yang dibina dalam peningkatan kapasitas (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	200 Orang	416.425.850	PAD		120 Lembaga	250.000.000
		Jumlah pengurus LKD yang mendapatkan sosialisasi tentang Pemanfaatan Pekarangan melalui Penyediaan Pangan Keluarga		75 Orang					

		Jumlah LKD yang terevaluasi dalam pelaksanaan Konvergensi Stunting		42 LKD					
2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah paket sarana dan prasarana LKD yang tersedia (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	66 Paket	4.649.248.317	PAD		40 unit	897.255.475
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan Bimtek Pengembangan kewirausahaan	12 Kab	90 Orang	395.505.108	PAD		2 Dokumen	310.000.000
		Jumlah masyarakat yang memperoleh pengembangan Usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes		3 Unit					
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah posyante yang mengikuti Bimtek Pengembangan Kapasitas Posyante dalam penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Kab	40 Orang	272.991.834	PAD		2 Dokumen	250.000.000
		Jumlah paket sarana pengembangan Potensi Desa melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang diberikan kepada masyarakat		2 Paket					
		Jumlah kabupaten/kota yang mengikuti gelar TTG Tingkat Nasional		12 Kabupaten					
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	12 Kab	1 Laporan	50.000.100	PAD		1 Laporan	250.000.000
		Jumlah pengurus LKD yang mendapatkan sosialisasi tentang nilai-nilai gotong royong	12 Kab	120 Orang					

2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah peralatan Pelaksanaan Program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) yang disediakan	12 Kab	164 Buah	50.000.268	PAD		3 Dokumen	240.000.000
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Hasil Pembinaan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kab	310 PKK	1.000.000.100	PAD		5 Laporan	1.200.374.525
2.13.05.1.01.10	Pegkatasadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah peralatan Pelaksanaan Program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) yang disediakan	12 Kab	-	-	PAD		50 Keluarga	75.000.000
2.13.05.1.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	12 Kab	-	-	PAD		50 Keluarga	75.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024, disusun dalam rangka pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang mendukung Program Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan mendukung pencapaian Visi, Misi RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 pada yaitu Misi ke-2 Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spiritual Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM dan Misi ke-3 Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja untuk pencapaian tujuan Meningkatkan Perkembangan Desa menuju Pembangunan yang Berkelanjutan adalah 5 Program, 8 Kegiatan penunjang urusan pemerintah provinsi, 4 kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, 27 sub kegiatan penunjang urusan pemerintah provinsi dan 40 sub kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan rincian program prioritas sebagai berikut:

- (1) Program Penataan Desa
- (2) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- (2) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- (4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024			
						Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						25.531.165.961		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi, Pelayanan yang efektif dan efisien serta Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,30	71	12.947.150.717	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
		2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,80	81,80	119.346.650	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab

		2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	4 dokumen	5 dokumen	51.469.800	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	24.866.950	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
		2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan, 2 dokumen	43.009.900	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
		2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	89,17	100%	10.483.027.353	Dinas PMD Prov.	Provinsi
				Persentase Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Kegiatan yang tepat waktu		100%			
				Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu		100%			
				TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah		60%			
		2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	64 orang/ 4 bulan (256 org)	64 Orang	9.242.817.803	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	1 Dokumen	12 Kegiatan	1.193.579.700	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	3 Laporan	13 Laporan	46.629.850	Dinas PMD Prov.	Provinsi

		2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	100	49.809.900	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan Kab
				Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan				
		2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Inventarisasi BMD dan laporan Barang Persediaan	1 Laporan	2 Laporan	49.809.900	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan Kab
				Jumlah aset yang tercatat		1 Laporan			
		2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	1 Dokumen	60	53.704.850	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	-	-	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	1 Dokumen	11.219.850	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	-	-	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160	12 orang, 5 kali	42.485.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	380	-	-	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab

		2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan kebutuhan barang dan jasa penunjang pelayanan	1 Dokumen	100%	960.915.954	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
				Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan				
		2.13.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	25.008.970	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	96.189.084	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	-	-	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	50.000.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	30.000.100	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	12 Laporan	759.717.800	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
		2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	1 Dokumen	60	266.997.350	Dinas PMD Prov.	Provinsi
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan				

		2.13.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	-	-	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 set	2 paket	23.535.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	86 unit, 2 paket	23 Unit	243.462.350	Dinas PMD Prov.	Provinsi
				Jumlah Laporan Fasilitas Pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah		1 Laporan			
		2.13.01.1.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 paket	-	-	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	100	457.629.560	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	-	-	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	12 Laporan	457.629.560	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	100	555.719.100	Dinas PMD Prov.	Provinsi
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan				

		2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	92 unit	34 unit	160.919.100	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	72 unit	194.800.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2Unit	1 Paket	200.000.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Dinas PMD Prov.	Provinsi
Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Meningkatnya status Kemajuan dan Kemandirian Desa			Indeks Desa Membangun	0,6978	0,7178		Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
		2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang tertata kelembagaan Pemerintahan Desanya	6,080	82%	2.820.522.580	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat layanan kemasyarakatan	-	8,46%			

		2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Persentase desa yang terfasilitasi dalam penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa sesuai regulasi	1 Laporan	8,70	2.820.522.580	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat ketersediaan sarana dan prasarana		1,14%			
		2.13.02.1.01.01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	,-	,-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	2 Dokumen	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Desa yang terdampangi dalam pengaturan SOTK Pemerintahan Desa sesuai regulasi	3 Dokumen	24 Desa	59.999.950	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah usulan Pemekaran Desa yang terdampangi		2 Desa			
		2.13.02.1.01.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tersalurkan bantuan dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Pemerintahan Desa	104 Unit	21 Desa	2.760.522.630	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	1.846	2,44%	345.000.050	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Persentase BUMDes/BUMDesma yang telah memanfaatkan Potensi Desa		2%			
		2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang terbina dalam pelaksanaan kerjasama desa antar kabupaten/kota/jumlah total desa	1 Laporan	1,62%	345.000.050	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	jumlah desa yang mengusulkan kerjasama desa dengan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	-	30 Desa	100.000.100	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah BUMDesma kawasan perdesaan yang terdampingi dalam pengembangan Potensi		21 Bumdes dan 1 Bumdesma	244.999.950	Dinas PMD Prov.	Kab. Parigi Moutong, Poso, Donggala, Sigi, Buol, Morowali
				Jumlah Bumdes/ BUMDesma di luar kawasan perdesaan yang terdampingi dalam pengembangan Potensi		45 Bumdes			
				Jumlah BUMDesma yang terdampingi dalam penyediaan sarana dan prasarana Pengembangan Usaha BUMDES/ BUMDESMA di luar kawasan perdesaan		12 Bumdes			
				Jumlah Pengurus BUMDes yang mengikuti Pembinaan Kewirausahaan BUMDes		30 orang			

		2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah desa yang meningkat tata kelola Pemerintahannya		30,51%	2.484.320.637	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Persentase desa dan kelurahan kategori kurang berkembang yang meningkat statusnya		46,30%			
				Persentase peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat		80,29%			
				Persentase BUMDes yang meningkat layanan usahanya		3,86%			
		2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		5%		Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Persentase desa dan kelurahan yang terevaluasi perkembangannya		35,53%			
				Persentase desa yang meningkat ketersediaan dan pemutahiran data Profil Desanya		11,02%			
				Persentase peningkatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa		2,05%			
				Persentase BUMDes yang meningkat kapasitasnya		32%			

		2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa		-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mengikuti Bimtek Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		30 Orang	114.999.800	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan		-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang terbina dalam Bimtek Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		30 Orang	104.829.900	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		-		Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa dan kelurahan yang terevaluasi dalam perkembangan desa dan kelurahan (Epdeskel)		12 Desa, 13 Kelurahan	115.000.100	Dinas PMD Prov.	12 Kab

				Jumlah Desa dan Kelurahan yang memenuhi tahapan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan		12 Desa, 13 Kelurahan			
		2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Aparatur Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek penyusunan Profil Desa dan Kelurahan		100	129.999.900	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Sekretaris Desa yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Administrasi Desa		40 Orang	135.000.150	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	-	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	-	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	-	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Jumlah Bumdes yang terbina dalam pengembangan kapasitas		107 Bumdes	1.824.490.737	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah Bumdes yang memperoleh penyediaan sarana dan prasarana		38 Bumdes			
		2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang mengusulkan untuk diidentifikasi penetapan dan Penegasan Batas Desanya		4 Desa	60.000.050	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah aparaturnya Desa yang mengikuti Bimtek Penetapan dan Penegasan Batas Desa		25 Orang			
				Jumlah Kabupaten yang terdampingi dalam pengusulan perbup untuk Penetapan dan Penegasan Batas Desa		7 Kabupaten			
		2.13.04.1.01.17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	-	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	-	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	-	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.04.1.01.21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Kabupaten yang terdampingi dalam pelaksanaan pekan Inovasi Perkembangan Desa		2 Kabupaten	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/ Kota	-	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjalankan fungsinya		19,96%	6.934.171.977	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat	-	24%			
				Persentase Posyantek yang berdayaguna dalam penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		38%			
		2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan fasilitasi yang dipenuhi LKD dan TMMD		7,05%	6.934.171.977	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Persentase masyarakat miskin ekstreem yang dilibatkan dalam unit usaha BUMDes		14%			
				Persentase posyantek yang terbina dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Gna untuk pemberdayaan maasyarakat		25%			

		2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pengurus LKD yang dibina dalam penataan Kelembagaan (RT,RW,PKK,Posyandu,L PM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa		120 Orang	100.000.400	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pengurus LKD yang dibina dalam peningkatan Kapasitas (RT,RW,PKK,Posyandu,L PM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat		200 Orang	416.425.850	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah pengurus LKD yang mendapatkan sosialisasi tentang Pemanfaatan Pekarangan melalui Penyediaan Pangan Keluarga		75 Orang	-		
				Jumlah LKD yang terevaluasi dalam pelaksanaan Konvergensi Stunting		42 LKD	-		
		2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana LKD yang tersedia (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat		66 Paket	4.649.248.317	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		90 Orang	395.505.108	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah masyarakat yang memperoleh penyediaan sarana pengembangan Usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes		3 Unit			
		2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek yang mengikuti Bimtek Pengembangan Kapasitas Posyantek dalam penerapan dan Pemnafaatan Teknomogi Tepat Guna		40 Orang	272.991.834	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah paket sarana pengembangan Potensi Desa melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang diberikan kepada masyarakat		2 Paket			
				Jumlah kabupaten/kota yang mengikuti gelar TTG Tingkat Nasional		12 Kabupaten			
		2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		1 Laporan	50.000.100	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah pengurus LKD yang mendapatkan sosialisasi tentang nilai-nilai gotong royong		120 Orang			
		2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Peralatan Pelaksanaan Program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) yang disediakan		164 Buah	50.000.268	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Hasil Pembinaan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		310 PKK	1.000.000.100	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	Dinas PMD Prov.	12 Kab

BAB V

PENUTUP

5.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat desa dengan cara memberikan dorongan, peluang, kesempatan dan perlindungan melalui pengaturan dan pengendalian yang prosesnya sistematis dalam upaya pengembangan potensi yang dimiliki sehingga masyarakat di perdesaan mampu mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pembangunan di desa yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Salah satu upaya memberdayakan masyarakat dan desa di Provinsi Sulawesi Tengah adalah dengan implementasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dituangkan dalam kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara teknis dituangkan dalam Rencana Kerja perangkat daerah.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan perangkat daerah terkait dengan lebih optimal dalam menciptakan Good Governance.

Rencana Kerja ini merupakan pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, dimana pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seluruh unit kerja diharapkan dapat melaksanakan Rencana Kerja dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara sistematis dan konsisten.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 organisasi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

**Organisasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

No	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab Umum dan Pengendali Program
2	Sekretaris	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Program
3	Kepala Bidang	Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan
4	Kasubag dan Kasubid	Penanggung Jawab Pelaksana Sub Kegiatan
5	Para JFU/Staf di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawes Tengah	Pelaksana Input dan Operasional Penyelenggara Kegiatan, Sub Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kerja

5.2 PENUTUP

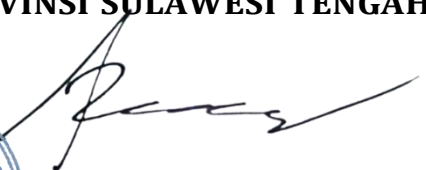
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disusun sebagai pedoman yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif, sehingga memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh aparatur sebagai pelaksana kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Palu, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH




Drs. MOHAMAD NADIR M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19660816 19860

